

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ketertarikan penulis mengangkat tema “WACANA GENDER DAN PERANAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KONTEKS KEKUASAAN POLITIK” (Studi Kasus Megawati Sukarnoputri), sebagai judul skripsi merupakan tanggapan atas fenomena yang saat ini berkembang baik nasional maupun global yakni masalah kesetaraan gender. Dunia yang selama ini mengakui kepemimpinan dan kekuasaan laki-lakilah yang dianggap mampu mengatasi segala persoalan dunia. Namun realita mengatakan lain dengan munculnya kekuatan baru yakni kekuasaan wanita dalam “*women in power*” mau atau tidak dunia harus mengakui kredibilitas perempuan dalam memegang kekuasaan.

Kita lihat gerak langkah, sepak terjang gerakan perempuan mulai abad XIX yang diawali perjuangan untuk mempunyai hak pencarian hidup di luar rumah dengan memberikan lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi perempuan di Eropa saat revolusi industri. Pada pertengahan abad XX mulai tampak gerakan perempuan terutama para perempuan terpelajar yang memulai di bidang politik yang menjadi salah satu tonggak *lobby* untuk mendapatkan hak wanita dalam penghidupan yang layak, diantaranya dapat kita lihat pemimpin wanita yang mampu menduduki kekuasaan : Sirimavi Bandaranaike di Srilanka menjadi perempuan Perdana Menteri pertama. Indira Ghandi menjadi Perdana Menteri

India pada 1966-1977 dan menjadi Perdana Menteri lagi pada tahun 1980. Golda Meier menjadi Perdana Menteri Israel tahun 1969-1974. Isabel Peron menjadi Presiden Argentina tahun 1974-1976. Margaret Thatcher diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1979 dan masih banyak perempuan yang lain yang mampu memegang tampuk kekuasaan dan mengangkat nama bangsa.¹

Landasan dan gerakan perempuan dalam kekuasaan memunculkan istilah yang berkembang yakni feminis kekuasaan² yang banyak melibatkan perempuan untuk berperan aktif. Ideologi yang dijunjungnya luwes dan inklusif, bersifat melingkupi apa yang menjadi tanggung jawab perempuan secara domestik dan eksternal. Intisari prinsip-prinsip para feminis kekuasaan adalah³ :

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya arti besar dalam kehidupan manusia.
2. Perempuan berhak menentukan nasib sendiri.
3. Pengalaman-pengalaman perempuan punya makna, bukan sekedar omong kosong yang tak penting.
4. Perempuan berhak mengungkapkan kebenaran tentang pengalaman-pengalaman mereka.

¹Dr. Aida Vitalaya, dalam makalah Seminar Nasional, *Wacana dan Gerakan Perempuan Kontemporer : Peta Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia, Antisipasi Untuk Gerakan Perempuan Muslim*, PP. 'Aisyiyah, Yogyakarta 2000.

²Karakter Feminis Kekuasaan diistilahkan oleh Naomi Wolf adalah para perempuan yang mampu menunjukkan potensi diri, kemampuan diri, bukan sebagai korban. Naomi Wolf, *Gegar Gender, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1999, hal 203.

³ *Ibid*, hal. 205

5. Perempuan layak menerima lebih banyak lagi segala sesuatu yang mereka tak punya hanya karena mereka perempuan : rasa hormat dari orang lain, rasa hormat terhadap diri sendiri, pendidikan, keselamatan, kesehatan, keterwakilan, keuangan.

Penetrasi global ini pun tak bisa luput dari bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar dan dinamis, sejak jaman pra kemerdekaan perempuan Indonesia sudah mengenal perjuangan menegakkan keadilan. Kita mengenal nama Seri Ratu Alam Safiatudin Johan Berdaulat adalah seorang wanita yang menjadi raja di Aceh yang dinobatkan pada tahun 1641 menggantikan suaminya Sultan Iskandar Muda. R.A. Kartini, Cut Nyak Dien dan lainnya kita kenal sebagai srikandi Indonesia. Dalam masa krisis Indonesia mampu memunculkan sosok pemimpin perempuan yakni Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama. Perempuan Indonesia yang selama ini dikenal dengan perempuan yang ramah, penuh sopan santun dan keibuan mampu melahirkan pimpinan yang akan membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas penulis berupaya memaparkan dalam penulisan yang sistematis untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi dari judul yang penulis ajukan untuk skripsi ini.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan kajian hubungan internasional tentang diskursus gender sebagai isu global dewasa ini melalui studi kasus kepemimpinan dan kekuasaan perempuan di Indonesia terhadap kepentingan perempuan.
2. Sebagai sarana implementasi teori-teori hubungan internasional pada kasus-kasus aktual, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Menyajikan secara deskriptif dan eksplanatif kepemimpinan Megawati dalam perannya sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia.
4. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Fenomena dan wacana hubungan internasional selama ini dibagi menjadi dua kategori yakni *Low Politics* dan *High Politics*. *Low politics* meliputi bidang: ekonomi, sosial, budaya, dan *high politics* meliputi bidang : pertahanan dan keamanan, hubungan *state to state* serta masalah pemerintahan. Dalam era modernisasi yang semakin berkembang, isu-isu hubungan internasional pun semakin kompleks, terutama isu-isu yang selama ini dikenal sebagai isu *low*

politics, diantaranya isu globalisasi, individualisme, kanan dan kiri, subjek-aktor politik, masalah-masalah ekologi yang berkembang pada era 80-an.⁴

Saat ini gender bukan lagi kita bicarakan pada dataran isu tapi beralih pada dataran diskursus (wacana). Perbincangan diskursus gender ini tak luput dari kajian berbagai sudut pandang. Dalam perspektif Islam, walau bagaimanapun kita tak akan lepas dari koridor yang sudah dicantumkan sebagaimana firman Allah, bahwa Allah membuat segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Sebagaimana tercantum dalam surat Yasin ayat 36 : “Mahamulialah Dia menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan” Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 : “dan dari tiap-tiap barang kita membuat pasang-pasangan, agar supaya kamu ingat”. Memang kalaulah kita perhatikan bukan hanya manusia yang berpasang-pasangan, bukan hanya laki-laki dan perempuan, dunia binatang pun ada betina dan jantan, bunga pun ada betina dan jantan, siang dan malam, ada buka dan tutup, positif dan negatif, langit dan bumi, utara dan selatan, ujung dan pangkal yang semuanya berpasang-pasangan sesuai dengan kehendak sang pencipta, semuanya hidup selaras dengan membiarkan apa adanya berkembang.

Hubungan antara makhluk Tuhan yang satu dengan yang lain akan membawa keselarasan yang indah bila ditempatkan dalam ruang yang benar dan mengetahui akan potensi diri yang ada pada masing-masing pasangan serta saling mengisi antara satu dengan yang lain sehingga keseimbangan keduanya terjaga.

⁴ Anthony Giddens, *The Third Way : Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 32

Garis-garis imajiner yang menggambarkan segitiga dengan uraian Allah sebagai titik ujung dan sentral yang membawahi ciptaannya yakni alam sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos,⁵ di mana manusia sejajar dengan alam yang keduanya membawa hubungan timbal balik. Di dalam unsur manusia kita mempunyai kekuatan Tuhan dan Alam, keselarasan keduanya memberikan kontribusi positif bagi manusia.

Dari sudut pandang yang lain yakni kebudayaan Cina yang memiliki peradaban yang dinamis menyebutkan adanya kekuatan *Yin* dan *Yang* dalam filsafat Tao. Saat ini mempunyai arti yang beragam mengenai pemahaman *Yin* dan *Yang* dalam pandangan gambaran yang asli dihubungkan dengan dua kutub dasar, *Yin* tampaknya bisa ditafsirkan berkaitan dengan aktifitas yang responsif, konsolidatif dan kooperatif, sedangkan *Yang* mengacu pada aktifitas agresif, ekspansif dan kompetitif. Aksi *Yin* adalah sadar lingkungan, aksi *Yang* adalah sadar akan dirinya sendiri. Dalam terminologi modern kita menyebut *Yin* sebagai “eco-action” dan *Yang* sebagai ego-action.⁶

Saat ini para analis gender melihat dari sudut pandang era modern sehingga mencatat berbagai manifestasi ketidakadilan seperti yang diuraikan berikut⁷: *pertama*, terjadi marjinalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan

⁵Sachiko Murata, *The Tao of Islam*. Mizan, Bandung, 1999, hal. 47.

⁶Pritjof Capra, *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Bentang, Yogyakarta, 2000, hal. 12

⁷Dr. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 72-75

meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan perbedaan gender. *Kedua*, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan yang dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan. *Ketiga*, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin perempuan. Di dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang diberikan kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. *Keempat*, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan. *Kelima*, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Dengan kata lain gender perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh kerja domestik.

Dalam arus gelombang peradaban, dan bila kita kembali membuka lembaran sejarah peradaban manusia, maka akan tampak bahwa kaum perempuan adalah manusia dengan berbagai karya mulia yang mengubah jalan hidup manusia bukan sebagaimana sekarang ini. Ketika manusia baru dalam peradaban taraf berburu, maka kaum perempuan mengambil peran yang sangat menakjubkan di

samping laki-laki yang mengejar binatang buruan. Perempuan bukan virus kemalasan malah justru sebaliknya. Ketika menunggu sang lelaki berburu, begitu banyak karya yang dilahirkan perempuan. Dari soal bercocok tanam (bertani), membuat rumah sampai pada pembuatan berbagai macam perabotan rumah.⁸

Sampai pada peradaban yang memperkenalkan sistem matriarkhal,⁹ di mana perempuan menjadi tumpuan bagi keluarga, dengan mengambil garis ibu sebagai penentu faktor keturunan dengan alasan untuk menyelamatkan kehormatan perempuan. Sistem itu juga tidak menjamin berlangsungnya kekuasaan perempuan dalam penentuan keputusan karena semakin lama arus berbalik terjadi di mana laki-laki kembali memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, dan perempuan hanya disimbolkan dari gabungan “dewi dan si tolol”,¹⁰ dewi digambarkan sebagai makhluk yang cantik penuh pesona dan lemah selalu bergantung kepada sang dewa dalam kekuatan, sedangkan tolol adalah orang yang tidak bisa berpikir dan berbuat sehingga semua masalah ada pengaturnya. Sistem matriarkhal yang ada saat ini di Sumatra Barat hanya sebagai simbol daerah yang hanya melestarikan tradisi nenek moyang, untuk kaum perempuannya hanya sebagai simbol dalam keluarga. Seperti yang akan dihidupkan kembali saat ini adalah sistem nagari, dalam sistem ini perangkat desa mungkin meninggalkan perempuan karena yang menjadi wali semuanya adalah laki-laki. Lembaga

⁸Budi Wahyuni, *Terpuruk Ketimpangan gender*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 1997, hal. 10.

⁹ Ir. Sukarno. *Sarinah*, Penerbit Buku-buku Karangan Sukarno, 1963, hal. 91

¹⁰ *Ibid*, hal. 33

Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Padang, Sumatra Barat dalam sebuah diskusi mengungkapkan bahwa sistem matrilineal pada masyarakat Sumatra Barat tidak menjamin terwakilinya suara perempuan karena dalam keluarga pihak perempuan hanya mengatur soal pewarisan.¹¹

Melihat lebih dalam gerakan perempuan di Indonesia dari realita Indonesia yang cakupannya lebih luas sebelum reformasi, di mana perempuan menjadi warga dominan (52 %). Gerakan perempuan Orde Lama yakni Gerwani adalah salah satu kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menginginkan perubahan radikal pada diri kaum wanita dengan mendidik kaum perempuan mandiri dan harus mandiri. Lain halnya dengan sistem Orde Baru yang memukul balik gerakan Orde Lama, menganut sistem konservatisme yang memperlihatkan kewanitaan dalam segala tindak-tanduknya seperti PKK, Dharma Wanita, arisan, gerakan keseharian itulah yang membangun politik perempuan yang belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan.¹²

Keberadaan perempuan itu tergantung di mana lingkungan perempuan itu berkembang. Di era kepemimpinan Suharto (Orde Baru) ada dua langkah awal positif dalam rangka peningkatan derajat hidup dan melindungi wanita, yaitu UU Perkawinan dan PP No. 10. Selama ini (dalam pemerintahan Suharto) belum ada langkah konkrit dari menteri UPW juga organisasi-organisasi wanita lainnya, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, 'Aisyiyah, Fatayat dan lain-lainnya untuk

¹¹Swara, *Kedudukan Perempuan Masih Jauh dari Harapan*, Kompas, 27 Januari 2002

¹²Swara, *Peran Politik Perempuan dihadap Tembok Budaya*, Kompas, 1 Oktober 2001

menyelesaikan sejumlah permasalahan wanita. Dan masih banyak organisasi wanita lainnya yang memperjuangkan hak perempuan dalam kehidupannya.¹³ Banyak hal yang dapat kita lihat peranan wanita dalam langkah politik perempuan di Indonesia. Konstruksi sosial kita yang membuat wanita tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik. Peran laki-laki sangat dominan atau sangat kuat, sehingga walaupun ada wanita yang muncul dalam karir politik, ini bukan suatu kehebatan wanitanya, tetapi merupakan kebaikan laki-laki (istri yang berkiprah dalam politik harus mendapat ijin dari suami). Tak ada posisi yang menguntungkan bagi kaum wanita karena memang sejak awal sudah dikondisikan bahwa wanita hanyalah sebuah *back up team* atau tim pendukung. Dalam hal politik wanita sebagai alat politik yang sangat efektif. Dalam masyarakat kita sejak kecil sudah dibuat adanya kebebasan terhadap apa yang dilakukan anak laki-laki sedangkan anak perempuan hanya boleh tinggal di rumah.¹⁴

Pergeseran politik global dari yang saat ini berkembang adalah demokratisasi. Demokratisasi merebak pula ke Indonesia yang selama ini mengakui diri sebagai negara demokrasi yang berasaskan Pancasila. Negara yang dulunya adalah negara yang aman dan tentram tidak ada gejolak perubahan yang berarti. Namun merebaknya isu global tidak luput dari Indonesia sebagai aktor politik internasional. Isu demokrasi yang berkembang adalah dengan menyuarakan

¹³Dr. H. Affan Gaffar, *Peran Wanita Dari Segi Politik dalam Potret Perempuan*, Kerjasama PSW dengan Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001, hal. 3

¹⁴*Ibid*, hal. 5

hati nurani rakyat. Di mana pemerintahan adalah merupakan perwakilan penuh rakyat. Indonesia yang selama ini terkungkung dan jauh dari apa yang namanya demokrasi, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat menimbulkan semangat reformasi yang akhirnya menghasilkan buah yang belum juga bisa dipetik hingga saat ini. Reformasi merupakan pintu terbukanya bagi semua yang ingin berbicara dan berpendapat termasuk juga bagi kaum feminis yang ingin menyuarakan hati perempuan. Terbentuknya lembaga-lembaga advokasi dan LSM untuk perempuan sampai juga terbentuknya partai perempuan, ini adalah tanda bangkitnya kaum perempuan di Indonesia.

Naiknya Megawati dalam pergulatan kekuasaan nasional merupakan diskursus bagi perpolitikan masa depan terutama bagi politik perempuan. Isu gender mulai diangkat ketika Megawati naik menjadi ketua umum PDI-P sampai menjelang pemilu 1999. Pada masa kampanye pemilu, partai-partai saingan PDI-P, khususnya partai yang berbasis Islam, menggunakan kutipan hadits yang memojokkan Megawati. Pro dan kontra yang terjadi dengan berbagai argumen yang menimbulkan *political fallacy* terutama masalah gender. Berbagai argumen *political fallacies* sering membuat terkecoh. Salah satunya reaksi kaum feminis yang menyebutkan hak Megawati lebih besar, karena secara statistik jumlah perempuan di Indonesia lebih besar dari jumlah laki-laki. Dalam pemerintahan Megawati saat ini kita melihat Megawati adalah figur perempuan Indonesia yang tak luput dari diskriminasi secara kultural yang sudah terbangun sejak lama. Namun dari sini kita melihat kinerja Megawati dalam mereformasi total sistem

pemerintahan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat termasuk juga berkeadilan gender. Terpilihnya Megawati sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden RI telah memberikan dukungan moral dan politis bagi gerakan perempuan dalam politik yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundangan lainnya. Namun di sisi lain, naiknya Megawati menjadi Presiden RI menjadi ujian berat bagi gerakan perempuan, khususnya bagi keberhasilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya.

Harapan para aktivis gerakan perempuan sangat besar terhadap kelangsungan dan keberhasilan kepemimpinan Megawati. Keberhasilan kepemimpinan Megawati akan membuka peluang besar bagi upaya untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Sedangkan ketidakmampuannya dapat mempersulit perjuangan gerakan perempuan di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan masalah tersebut *NGO (Non Governmental Organization)* peduli kepentingan perempuan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Memasukkan perempuan paling sedikit 30% dalam susunan kabinet dan 50% dalam jabatan eselon I dan eselon II.
2. Memastikan bahwa upaya untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang kebijakan dasarnya telah diletakkan oleh DPR melalui UU No. 25 Tahun 2000 tentang propernas dan UU No. 25 tahun 2000 tentang Repeta 2001 serta Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang mampu

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh GBHN.

3. Melakukan upaya-upaya yang nyata untuk menghentikan dan menghapuskan segala bentuk perlakuan beda dan kekerasan perempuan dan anak-anak. Masalah ini khususnya dilakukan di daerah konflik, seperti Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan dan lain-lain.¹⁵

Melihat tuntutan yang diajukan oleh gerakan perempuan tersebut, merupakan usaha untuk kemajuan kaumnya. Namun kinerja Megawati selama masa pemerintahannya kita melihat dari anggota kabinet Gotong Royong terdiri dari 32 menteri hanya ada dua menteri perempuan yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soewandi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki Sumaryoto, keduanya diangkat bukan dari kalangan aktivis perempuan tetapi melalui aktivis partai politik dan profesional. Jawaban atas tuntutan tersebut terjawab saat di langungkannya hari Ibu ke-73 terutama masalah tuntutan permintaan kuota di kabinet dan jabatan bahwa, perolehan jabatan politik atau eselon tertentu dalam birokrasi pemerintahan yang didasarkan pada pemberian preferensi atau kuota kepada kaum perempuan, selain bersifat kontra produktif juga merendahkan martabat fungsional kaum perempuan itu sendiri. Ditegaskannya lagi, perolehan kedudukan atau peran karena keistimewaan serupa

¹⁵Semai : Untuk Keadilan dan Demokrasi, Profil : *Pemerintahan Baru, Tantangan Tetap Membentang*, KPI Untuk Keadilan dan demokrasi, Edisi XIII Agustus 2001, hal. 9

itu secara moral malah menghadirkan beban bagi kaum wanita itu sendiri. Karena untuk mencapai kemajuan, kaum perempuanlah yang harus meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidupnya sendiri. Selain kontra produktif, pada titik tertentu kondisi serupa juga merendahkan martabat fungsional kaum perempuan itu sendiri, Mega mengungkapkan di depan para tamu undangan yang sebagian besar perempuan.¹⁶ Dalam Masalah penanganan HAM perempuan di daerah konflik, suara presiden Megawati tidak terdengar menyuarakan kepeduliannya terhadap perempuan di daerah konflik. Nasib perempuan yang ada kini hanya menunggu keajaiban yang mengubah mereka ke arah perubahan yang lebih berarti guna bersama-sama membangun bangsa dalam posisi persamaan hak dalam pembangunan bangsa.

D. Pokok Pemasalahan

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, muncul pertanyaan yang mendasar, yang dirumuskan dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

Mengapa Presiden Megawati dalam peranannya dan kekuasaannya sebagai seorang perempuan presiden tidak responsif terhadap tuntutan masalah perempuan?

¹⁶Artikel, *Mega : Ada Yang Mulai Skeptis*, Kedaulatan Rakyat, 28 Desember 2001

E. Landasan Teori

Dalam melihat permasalahan di atas setidaknya ada beberapa kerangka pemikiran baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Dan berteori adalah pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.¹⁷

Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena.¹⁸

Untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada penulis menggunakan :

1. Pengertian Gender

Gender mempunyai arti yang berbeda dalam setiap pemaknaan tergantung bagaimana dan di mana kata gender itu diartikan. Kata *gender* dalam bahasa Inggris berarti penggolongan menurut jenis kelamin.¹⁹ Pengertian sex (jenis kelamin) menurut Julio Cleves Mosse adalah kodrat laki-laki atau perempuan yang dibawa sejak lahir.²⁰ Menurut Mansour Fakih sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan

¹⁷ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : disiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 185

¹⁸ *Ibid*, hal, 93

¹⁹ Drs. Peter Salim, *The Contemporary English – Indonesia dictionary*, Modern English Press, Jakarta , 1987, hal. 771

²⁰ Julio Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Terjemahan Hartian Silawati, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 2

gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara.²¹ Dan menurut Oakly, sex (jenis kelamin) adalah kodrat Tuhan dan karenanya secara permanen berbeda.²² Teori feminis modern sangat berhati-hati membedakan antara jenis kelamin dan gender. Dengan mengacu pada karya Margaret Mead *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (1935), teori ini menempatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah konstruksi sosial.²³

Kita mengenal Indonesia sebagai negara yang memiliki pluralitas budaya, dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa yang mayoritas penduduk adalah perempuan. Dan budaya kita merupakan budaya turunan nenek moyang yang berbau primordialisme dan patriarkhal. Di mana sistem patriarkhal suatu sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Dalam setiap bentuk historis masyarakat patriarkis baik yang feodal, kapitalis maupun sosialis, sebuah sistem berdasarkan gender dan jenis kelamin serta diskriminasi ekonomi beroperasi secara simultan. Patriarki mempunyai kekuatan dari akses laki-laki yang lebih

²¹ Mansour Fakih, *op.cit.* hal. 8

²² Oakly, *Sex, Gender and Society*,: (Harper and Row), New York 1972

²³ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hal. 177

besar dan menjadi mediasi dari sumber daya yang ada dan ganjaran dari struktur otoritas di dalam dan di luar rumah.²⁴

2. Hak Perempuan Dalam Politik

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani dan diserap dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Pada jaman klasik Yunani, negara/kota disebut *Polis*. Plato (322 SM) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan *Politikon*. Maka politik memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara atau cara untuk mencapai tujuan.²⁵ Yang dimaksud hak politik adalah hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara.²⁶

Dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus. Sebab, hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hak itu disebabkan hak mutlak sebagaimana yang diterima membolehkan seseorang menggunakannya atau tidak menggunakannya melalui konstitusi.

Adapun jika hak politik itu tidak digunakan dalam banyak pembuatan undang-undang maka hal itu mengancam dijatuhkannya sanksi, terutama karena

²⁴*Ibid*, hal. 332

²⁵B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 518-519.

²⁶ Muhammad Anis Qosim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan : menelusuri hak politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Zaman, Bandung, 1998, hal. 35

hak-hak politik itu tidak berlaku kecuali bagi orang yang memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan.

Hak-hak politik ini menyuratkan partisipasi individu dalam pendapat umum baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di majelis-majelis dan berbagai lembaga perwakilan atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota lembaga perwakilan tersebut.

Hak-hak politik mencakup :

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
3. Hak dalam pencalonan presiden dan lain-lain hal yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan masalah politik²⁷

Ketika mendirikan negara Republik Indonesia, pendiri Republik ini terpengaruh dengan adanya gender dan feminisme saat merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Di dalamnya tidak terlihat sama sekali adanya diskriminasi atau pembedaan perlakuan antara warga negara pria maupun wanita. Pasal-pasal tentang hak-hak azasi itu menggunakan istilah “warga negara”, tanpa perbedaaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan

²⁷ *Ibid.* hal. 36-37

(lihat pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945) begitu juga persyaratan untuk menjadi presiden (pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945) atau menduduki jabatan-jabatan politik lainnya. Dengan demikian perspektif konstitusi dan hukum peran wanita mendapatkan tempat yang proporsional.²⁸

Realita yang menunjukkan ini dengan adanya budaya perempuan sebagai *konco wingking* yang berkecimpung dalam tradisi : macak, manak, masak. Dalam kerja domestik perempuan yang lebih didominasi dengan membuat hak paten itu semua adalah pekerjaan perempuan. Diskriminasi bukan hanya terjadi di bidang domestik tapi di luar rumah pun terjadi. Diskriminasi suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan yang didasarkan pada keyakinan patriarkis bahwa perempuan memiliki atribut yang tidak dikehendaki.

Penempatan perempuan pada posisi marjinal dan pengaruh globalisasi yang membangkitkan semangat untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dengan memperjuangkan hak-haknya melalui organisasi, ataupun gerakan-gerakan yang mendukung adanya penyetaraan gender dalam berbagai *background*, baik itu sosialis, liberal maupun kapitalis konservatif yang semuanya memiliki persamaan tujuan persamaan gender dalam kehidupan yang berarti penyetaraan berdasarkan hak dan kewajiban bukan hanya berperan

²⁸Moh. Mahfud MD, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan : KEMITRASEJAJARAN : Perspektif Politik*, Cides dan UII, Jakarta, 1998, hal. 69

domestik, tapi berbondong-bondong ke luar rumah untuk mencari kehidupan yang lain yang menjadi hak bagi perempuan.

Sampai saat ini di era reformasi ini kita melihat penerapan hak-hak perempuan yang semakin terbuka dengan semakin banyaknya LSM dan gerakan-gerakan perempuan dan perempuan dalam bidang politik, kita mengenali semenjak masa Orde Baru dengan munculnya politikus wanita seperti 'Aisyah Amini melalui PPP, Siti Hardiyati Rukmana yang aktif dalam bidang Sosial serta Megawati Sukarnoputri yang menjadi pucuk pimpinan PDIP

3. Teori Peranan (*Role Theory*)²⁹

Teori Peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik, yang menemukan dirinya dalam berbagai posisi yang memiliki pola perilaku sendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan (*expectation*) serta sistem yang berlaku itulah yang membentuk peranan.

²⁹ Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisa dan Teorisisasi*, PAU-SS UGM, Yogyakarta, 1989, hal.44

Menurut Alan Isaak, harapan itu bisa berasal dari harapan yang dipunyai orang lain terhadap seorang aktor politik. Artinya setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu gagasan tentang apa yang harus ada dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik. Yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukannya, tentang sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum memegang peranan yang dimainkan. Teori peranan menekankan bahwa perilaku aktor politik dipengaruhi oleh peran yang dimainkannya atau posisi dalam pemerintah.

Secara teoritis kepemimpinan negara Indonesia merupakan peran yang dijalankan oleh seorang presiden - yang sekarang tengah dipegang oleh Presiden Megawati Soekarnoputri - dalam mengemban amanat rakyat. Presiden adalah jabatan politik oleh karena itu teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik, yang menemukan dirinya dalam berbagai posisi yang memiliki pola perilaku sendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan (*expectation*) serta sistem yang berlaku itulah yang membentuk peranan. Menurut Alan Isaak, harapan itu bisa berasal dari harapan yang dipunyai orang lain terhadap seorang aktor politik. Artinya setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu gagasan tentang apa yang harus ada dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik. Yaitu

harapannya sendiri tentang apa yang harus ada dan apa yang tidak boleh dilakukannya, tentang sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum memegang peranan yang dimainkan. Teori peranan menekankan bahwa perilaku aktor politik dipengaruhi oleh peran yang dimainkannya atau posisi dalam pemerintah. Pada masa reformasi dan transisi peranan seorang presiden banyak dibutuhkan keberpihakannya pada masalah kepentingan rakyat guna mempertahankan kedudukannya sampai akhir masa jabatannya.

F. Hipotesa

Berdasarkan teorisasi di atas, Megawati tidak responsif terhadap tuntutan perempuan karena :

Megawati dihadapkan pada agenda-agenda reformasi yang lebih mendesak dan kepentingan partai-partai politik yang harus dijaga dari pada isu penyeimbangan hak gender yang digulirkan para aktivis perempuan.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini mengambil rentang waktu sejak Megawati memimpin PDI-P, pemilu 1999 dan menjabat sebagai presiden sampai sekarang sebagai obyek penelitian penulisan skripsi.

H. Jenis Penulisan

Jenis penulisan skripsi ini dengan menggunakan penulisan eksplanatif yang menerangkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini menjabarkan dan memadukan berbagai macam informasi yang diterima.

I. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (*library Reseach*) yang meliputi data-data yang bersumber pada buku-buku, majalah, surat kabar, maupun literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian, termasuk mengakses berbagai sumber data dari internet.

J. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi : alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, jenis penulisan, pengumpulan data, sistematika penulisan dan kerangka penulisan

BAB II merupakan penjelasan panjang dari latar belakang masalah mengenai permasalahan gender secara umum dan global, juga pada kasus spesifik gerakan politik perempuan, harapan aktivis perempuan di Indonesia

BAB III masih merupakan penjelasan panjang dari latar belakang masalah merupakan penjelasan spesifikasi Megawati dan sikap Megawati dalam kepemimpinannya dan respon terhadap tuntutan gerakan perempuan

BAB IV merupakan pengembangan hipotesa di mana proses uji hipotesa dilakukan. Pada BAB IV ini penulis mencoba mengungkapkan beberapa data yang mendukung fakta pada studi kasus peranan Megawati dalam kekuasaan politik dalam *setting* perpolitikan Indonesia termasuk dinamika partai politik yang saling memasukkan kepentingannya

BAB V merupakan kesimpulan ringkas dari keseluruhan penulisan skripsi.